

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sejak ASEAN terbentuk pertama kali pada tahun 1967, Tiongkok tidak sama sekali memiliki hubungan dengan organisasi yang beranggotakan negara-negara tetangganya tersebut. Hubungan Tiongkok dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara hanya sebatas hubungan bilateral dengan beberapa negara. Hubungan yang terjadi antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN sangat berbeda-beda dan juga mengalami perubahan. Contohnya seperti hubungan Tiongkok dengan Indonesia yang pada awalnya memiliki hubungan yang cukup hangat pada era kepemimpinan Presiden Sukarno namun berhenti pada era kepemimpinan Suharto yang sangat anti dengan komunisme.¹ Kemudian sikap Vietnam terhadap Tiongkok dipengaruhi oleh sejarah konflik kedua negara tersebut. Tiongkok merupakan negara yang telah mengokupasi Vietnam selama ratusan tahun dan konflik-konflik sengketa yang terjadi antara kedua negara tersebut juga menyebabkan ketidak harmonisan hubungan kedua negara.²

Selain nilai-nilai komunisme atau hubungan historis yang mempengaruhi negara-negara ASEAN untuk tidak membangun hubungan diplomatis dengan Tiongkok, terdapat juga sengketa Laut Cina Selatan (LCS) yang menyebabkan ketegangan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN. Sengketa wilayah

¹ Bruce Vaughn dan Wayne M. Morrison, *China-Southeast Asia Relations: Trends, Issues and Implication for the United States*, <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32688.pdf>, 2006, hal 26.

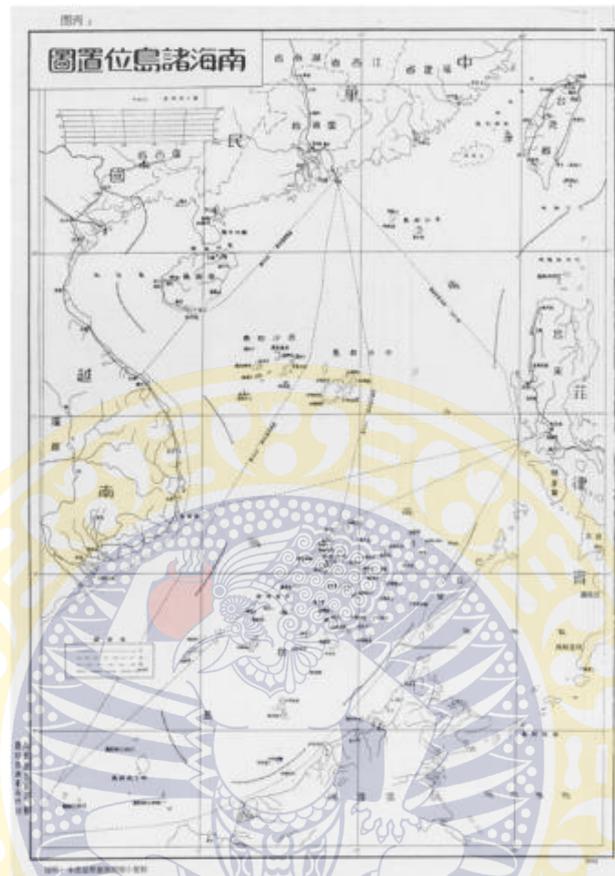
² Bruce Vaughn dan Wayne M. Morrison, *China-Southeast Asia Relations: Trends, Issues and Implication for the United States*, hal 27.

ini melibatkan empat negara ASEAN yaitu Brunei, Filipina, Malaysia dan Vietnam, serta melibatkan dua negara Asia lainnya yaitu Tiongkok dan juga Taiwan. Sebagai wilayah lautan, LCS memiliki nilai yang sangat menguntungkan dan strategis bagi negara-negara yang dapat mengakses langsung ke wilayah lautan tersebut.

Bentrok klaim wilayah di LCS merupakan alasan utama terjadinya konflik antar negara-negara di kawasan tersebut. Klaim Tiongkok atas wilayah kedaulatannya di LCS berbentrok dengan klaim negara-negara lain karena memasukan klaim negara lain dalam bagian dari wilayahnya. Negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunai mengklaim batasan wilayah mereka di LCS berdasarkan *Exclusive Economic Zone* (EEZ) yang sudah ditentukan oleh Konvensi PBB tentang hukum laut pada 10 Desember 1982.³ Sedangkan Tiongkok mengklaim batasan wilayah mereka melalui faktor historis. Setiap negara yang terlibat dalam kasus ini memperjuangkan kepentingan dan kedaulatan wilayah yang diakui oleh masing-masing negara.⁴ Hal tersebut menjadikan konflik sengketa wilayah ini menjadi suatu isu yang penting dan sulit untuk diselesaikan karena keinginan yang kuat dari masing-masing negara untuk mendapatkan kedaulatannya di wilayah tersebut.

³ Karim Suharna, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, *Majalah Tannas*, http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/1960_tannas%20karmin%20-%20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf, (diakses pada 12 Desember 2014), hal 36.

⁴ Karim Suharna, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, *Majalah Tannas*, hal 37.

Gambar 1.1 Pulau Laut Cina Selatan⁵

Sumber: United States Department of State, Limits in the Seas No.143 China: Maritime Claims in the South China Sea

Dapat dilihat di peta 1.1 bahwa klaim Tiongkok atas wilayah kedaulatannya di LCS sangat luas yang juga memasukan batasan-batasan wilayah yang telah diklaim oleh negara lain. Klaim Tiongkok terhadap LCS. Pada tahun 1947, Tiongkok mengeluarkan peta secara mendetail dengan garis-garis di wilayah LCS yang merupakan bagian wilayah klaim Tiongkok. Klaim yang dibuat Tiongkok menjadi masalah karena batasan wilayah dari negara lain masuk

⁵ United States Department of State, Limits in The Seas No. 143 China: Maritime Claims in the South China Sea, 2014, <http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf> (diakses 4 Juli 2015)

ke wilayah yang diklaim Tiongkok pada saat itu (lihat peta 1.1). Klaim yang diajukan oleh Tiongkok dilandasi oleh faktor historis Tiongkok yang menyatakan bahwa LCS merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok yang sudah digunakan oleh masyarakatnya sejak zaman dahulu sehingga hal tersebut memberikan legitimasi kepada Tiongkok untuk menjaga LCS sebagai bagian dari wilayahnya.⁶ Intensitas dari konflik sengketa wilayah ini sangat tinggi karena dalam beberapa kejadian sering terjadi bentrokan militer dari beberapa negara hingga memakan korban jiwa. Meskipun beberapa negara mencoba untuk menggunakan mediasi internasional untuk menyelesaikan kasus sengketa ini namun Tiongkok beranggapan bahwa kasus bentrokan klaim wilayah ini merupakan kasus yang bersifat bilateral, antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang mengklaim wilayahnya, sedangkan upaya-upaya negosiasi secara multilateral dalam kancah internasional dianggap tidak pantas.⁷

Namun pada tahun 1991, pada saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24 diselenggarakan di Kuala Lumpur, Tiongkok pada saat itu hadir dan secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dengan ASEAN dalam bidang sains dan teknologi. Pernyataan tersebut disambut baik oleh negara-negara ASEAN lainnya dan semenjak itu, hubungan antara Tiongkok dengan ASEAN terus berjalan dan semakin berkembang. Meningkatnya hubungan antara Tiongkok dengan ASEAN

⁶ Su Hao, *China's Position and Interests in South China Sea: A Rational Choices in its Cooperative Policies*, <http://csis.org/publication/chinas-positions-and-interests-south-china-sea-rational-choices-its-cooperative-policies>, hal 1-2.

⁷ Lam Yi Wen Rachel, *The Spratly Islands dispute: Multilateral negotiations within ASEAN and with China*, http://www.iew.unibe.ch/unibe/rechtswissenschaft/dwr/iew/content/e3911/e4043/e434096/addor_lam-rachel_ger.pdf (diakses pada 18 Desember 2014)

membuat status Tiongkok berubah menjadi *full dialogue partner* pada tahun 1996.⁸ Pada tahun 2002, Tiongkok dengan ASEAN meningkatkan hubungan mereka dalam bidang perdagangan dan bidang keamanan dengan membentuk *Free Trade Area (FTA)* dan juga menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)*.

Perencanaan pembentukan FTA antara Tiongkok dengan ASEAN dan penandatanganan DOC pada tahun 2002 merupakan peristiwa yang penting dalam melihat hasil perkembangan hubungan keduanya. Dalam waktu 11 tahun sejak 1991, Tiongkok dan ASEAN mampu meningkatkan kerjasamanya kedalam bidang perdagangan dan juga keamanan. Rencana pembentukan FTA diharapkan akan dapat meningkatkan dan memperkuat keadaan ekonomi di kawasan Asia Tenggara melalui peningkatan kerjasama ekonomi, politik dan juga investasi antar negara. Sedangkan penandatanganan DOC merupakan langkah awal dalam menyelesaikan konflik sengketa yang sudah terjadi selama puluhan tahun di LCS. Meskipun DOC tidak mengikat, namun penandatanganan DOC merupakan kemajuan yang sangat panjang karena Tiongkok sebelumnya tidak mau membahas konflik sengketa tersebut secara multilateral.

⁸ Sheng Lijun, *China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations*, hal 2, <http://www.iseas.edu.sg/documents/publication/ipsi12003.pdf> (diakses pada 18 Desember 2014)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi pada latar belakang masalah, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah: Bagaimana akses WTO mempengaruhi perubahan sikap Tiongkok terhadap ASEAN?

1.3 Kerangka Pemikiran

Unuk menemukan acuan yang tepat dan berhubungan dengan objek penelitian, maka penulis melakukan teorisasi mengenai: (1) Kebijakan Luar negeri; (2) proses kebijakan luar negeri; (3) perubahan kebijakan luar negeri; serta (4) globalisasi.

1.3.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu hal yang penting dalam hubungan internasional. Dimana dengan mengetahui kebijakan luar negeri suatu negara dapat diketahui sikap atau tanggapan negara tersebut terhadap suatu isu tertentu. Graham Evans menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan suatu bentuk aktivitas aksi, reaksi dan berinteraksi para negara dan aktor. Kebijakan luar negeri dideskripsikan sebagai suatu kegiatan perbatasan, dimana perbatasan memiliki arti bahwa terdapat dua lingkungan yang harus dihadapi oleh pembuat keputusan, yaitu lingkungan internal atau domestik dan lingkungan eksternal atau global. Sehingga para pembuat kebijakan dan sistemnya adalah mediasi antara lingkungan-lingkungan tersebut.⁹

⁹ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, 1998, hal 179

Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya melalui berbagai sikap serta aktivitas negara tersebut.¹⁰ Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, para pengambil keputusan akan mengambil langkah-langkah nyata yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal untuk membuat kebijakan luar negeri.¹¹ Adapun beberapa variabel internasional dan nasional yang diperhitungkan oleh para pengambil keputusan pada saat pembuatan kebijakan luar negeri, antara lain:¹²

- a. Keadaan atau lingkungan internasional secara umum; termasuk sikap, tindakan, dan pertimbangan kepentingan nasional aparat pemerintah dari negara lain;
- b. *Power* atau kapabilitas yang dimiliki negara dan sebagaimana diperhitungkan oleh para pembuat keputusannya, dan;
- c. Tindakan serta reaksi balik yang dilakukan oleh negara lain yang terpaut dengan keputusan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Sebagai tambahan, Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu gagasan atau tindakan yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan atau mempromosikan perubahan pada perilaku aktor lainnya. Selain itu, kebijakan luar negeri juga digunakan sebagai suatu instrumen untuk mempertahankan atau mengubah sebuah objek, kondisi atau praktik di

¹⁰ James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson dan Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hal 27

¹¹ James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson dan Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hal 27

¹² Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*. England: Clio Press, Ltd, 1982, hal 17.

lingkungan eksternal.¹³ Holsti juga menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yaitu faktor eksternal, faktor domestik dan faktor persepsi aktor pengambil keputusan.¹⁴ Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kebijakan luar negeri terdapat tiga faktor yang dapat menentukan pembentukan kebijakan tersebut yaitu faktor/lingkungan eksternal, faktor/lingkungan internal dan aktor pengambil keputusan.

Konsep kebijakan luar negeri digunakan oleh penulis untuk mengkaitkan bahwa sikap suatu negara dalam hubungan internasional merupakan kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis sebagai perubahan sikap Tiongkok terhadap ASEAN berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap ASEAN. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara yang juga mendefinisikan sikap negara tersebut dalam hubungan internasional terbentuk melalui suatu proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan negara.

I.3.2 Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok

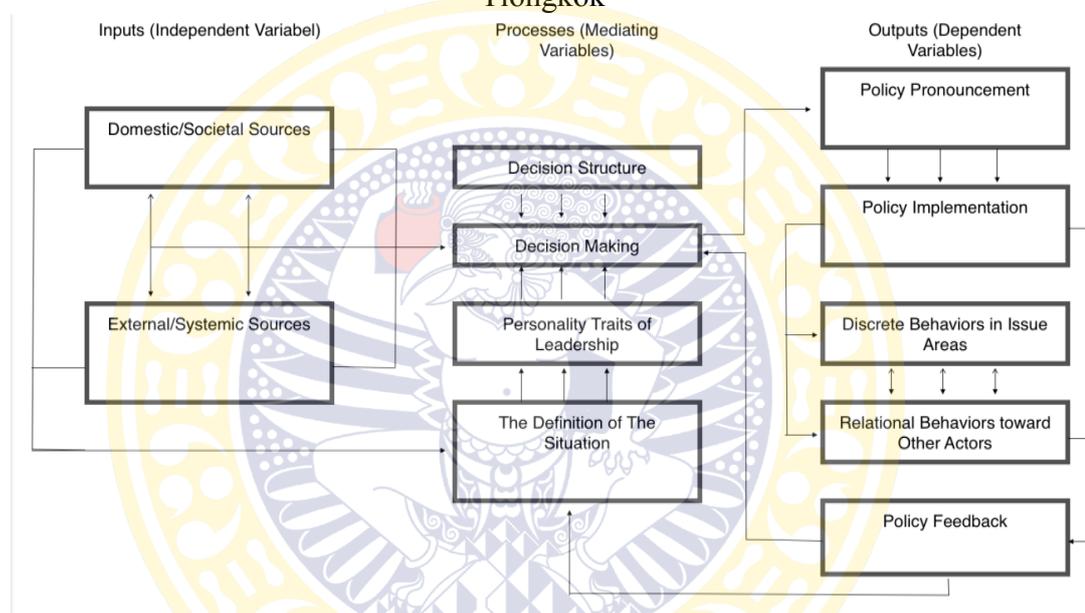
Dalam memahami proses kebijakan luar negeri Tiongkok, Samuel S. Kim mendeskripsikan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok dapat di konseptualisasikan seperti suatu sistem tindakan manusia dan sebagai sistem yang

¹³Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis 6th ed*, New Jersey: Prentice Hall International, 1992, hal 269.

¹⁴Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis 6th ed*, New Jersey: Prentice Hall International, 1992, hal 271.

memiliki struktur, nilai, norma dan proses.¹⁵ Samuel S. Kim juga berpendapat bahwa terdapat dua faktor utama yang merupakan landasan dalam terbentuknya suatu kebijakan luar negeri yaitu faktor internal (*domestic/societal*) dan faktor eksternal (*external/systemic*), dan bisa pula kedua faktor tersebut secara bersamaan mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok.¹⁶

Gambar 1.2 Model Sistem Kebijakan Luar Negeri Tiongkok



Sumber: Samuel S. Kim, *China and the World: Chinese Foreign Policy in the Post-Mao Era*

Dua variabel independen yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (*domestic/societal sources*) dijelaskan oleh Samuel S. Kim sebagai ekstensi dari eksternalisasi dari politik dalam negeri.¹⁷ Faktor-faktor internal yang dapat

¹⁵Samuel S. Kim, "1994, "Chinese Foreign Policy Behavior", dalam *China and the World: Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*, ed. Samuel S. Kim, Boulder and London: Westview Press, Inc, 1994, hal 5.

¹⁶Samuel S. Kim, "1994, "Chinese Foreign Policy Behavior", dalam *China and the World: Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*, hal 6.

¹⁷Samuel S. Kim, "1994, "Chinese Foreign Policy Behavior", dalam *China and the World: Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*, hal 16.

berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan luar negeri bersumberkan dari dalam negeri antara lain seperti budaya strategi dan politik, sejarah, identitas, ideologi, proses politik dalam negeri serta persepsi para pengambil keputusan.¹⁸ Sedangkan faktor-faktor eksternal (*external/systemic source*) merupakan pengaruh yang dihasilkan dari sikap dari negara-negara lain dan dari sistem internasional. Sistem internasional dijelaskan oleh penulis sebagai keadaan yang sedang terjadi di luar negeri yang dijelaskan sebagai komposisi dan stratifikasi dari interaksi antar unit yang berdasarkan dari jumlah dan tipe dari aktor yang berpartisipasi dalam proses tersebut memberikan gambaran secara empiris dari struktur internasional.¹⁹ Faktor internal dan faktor eksternal secara bersamaan juga dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri, faktor-faktor tersebut saling berinteraksi selama proses pembentukan keputusan.

Dalam memahami proses kebijakan luar negeri Tiongkok melalui model yang dipaparkan Samuel S. Kim, dapat dilihat bahwa proses kebijakan luar negeri Tiongkok dibagi menjadi tiga bagian. Pertama adalah *inputs* (masukan), yang merupakan masukan-masukan yang berasal dari faktor-faktor internal, eksternal atau keduanya. Kemudian terdapat masukan-masukan yang didasari dari faktor internal ataupun eksternal akan masuk ke tahapan *processes* (proses) dimana faktor-faktor yang menjadi landasan akan dimediasikan. Dalam tahapan ini, para elite pengambil keputusan akan mendefinisikan situasi dan menghasilkan tujuan serta strategi negara dalam mencapai tujuannya berdasarkan faktor-faktor yang dijadikan sebagai landasan pembentukan kebijakan luar negeri. kemudian di

¹⁸ Yew Meng Lai, *Nationalism and Power Politics in Japan's Relations with China*, 2008.

¹⁹ Samuel S. Kim, "1994, "Chinese Foreign Policy Behavior", dalam *China and the World: Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*, hal 20.

bagian terakhir dari proses pembentukan kebijakan luar negeri adalah *outputs* (hasil) dimana hasil atau kebijakan yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan akan dinyatakan dan diimplementasikan.²⁰ Kebijakan luar negeri suatu negara tidak selamanya sama, artinya suatu kebijakan luar negeri dapat mengalami perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan lingkungan atau kepentingan dari negara tersebut.

I.3.3 Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Dalam menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri, Charles F. Hermann²¹ menjelaskan bahwa terdapat empat jenis perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu: (1) *Adjustment Changes*: Perubahan terjadi pada tingkatan usaha suatu negara (bagaimana suatu negara akan meningkatkan atau menurunkan upayanya untuk mencapai tujuan dari kebijakannya) atau pada jangkauan target penerima kebijakan tersebut (seperti kelompok-kelompok tertentu). Dalam hal ini, *what is done*, *how it is done*, dan *the purposes for which it is done* tidak mengalami perubahan; (2) *Program Changes*: Perubahan terjadi pada metode atau cara yang digunakan oleh suatu negara dalam mencapai tujuan dari kebijakannya tersebut. Berbeda dengan *adjustment changes* yang lebih bersifat kuantitatif, *program changes* lebih bersifat kualitatif, artinya akan melibatkan kemampuan suatu negara dalam menentukan perubahan program (seperti pencapaian suatu tujuan melalui negosiasi dibandingkan dengan menggunakan kekuatan militer). Dalam hal ini, *what is done* dan *how it is done* akan mengalami

²⁰Samuel S. Kim, "1994, "Chinese Foreign Policy Behavior", dalam *China and the World: Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*, hal 21.

²¹Charles F. Hermann, *Changing Course: When Government Choose to Redirect to Redirect Foreign Policy*, 1990, <http://www.jstor.org/stable/2600403>, (diakses pada 3 Januari 2015)

perubahan, namun *the purposes for which it is done* akan sama; (3) *Problem/Goal Changes*: Hal ini menggambarkan perubahan yang terjadi pada tujuan awal dari kebijakan itu sendiri mengalami perubahan atau sudah tidak lagi menjadi target dari negara, sehingga akan ditinggalkan. Dalam perubahan kebijakan luar negeri ini, *the purpose for which it is done* mengalami perubahan sehingga juga akan mengubah *what is done* dan *how it is done*; (4) *International Orientation Changes*: Charles F. Hermann menyatakan bahwa perubahan ini merupakan perubahan yang paling ekstrim dari perubahan kebijakan luar negeri karena melibatkan perubahan secara keseluruhan orientasi para pengambil keputusan terhadap dunia, bagaimana orientasi pendekatan yang digunakan oleh para pengambil keputusan terhadap isu-isu ataupun suatu isu yang spesifik mengalami perubahan. Perubahan orientasi biasanya terjadi karena adanya pergeseran dari peran internasional atau aktivitas aktor yang bersangkutan. Sehingga setidaknya seluruh kebijakan luar negeri dari negara tersebut akan mengalami perubahan.

Perubahan kebijakan luar negeri dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan perubahan sikap Tiongkok. Perubahan sikap yang dialami Tiongkok disebabkan karena Tiongkok perlu melakukan perubahan pendekatan yang digunakan untuk mencapai kepentingannya. Keinginan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam globalisasi ekonomi, membuat Tiongkok harus lebih menjadi terbuka dengan negara-negara lainnya.

I.3.4 Globalisasi Ekonomi

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang didefinisikan dengan terjadinya peningkatan hubungan lintas batas dalam segala bidang, seperti ekonomi, politik,

sosial, dan budaya. Salah satu cara melihat fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk asing yang dijual di toko-toko atau dimainkannya lagu-lagu yang sama di seluruh dunia atau dengan munculnya tayangan-tayangan televisi asing.²² Kemudian Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld menjelaskan bahwa globalisasi merupakan suatu fenomena yang muncul dengan meningkatnya arus perdagangan antar negara. Meningkatnya kegiatan ekspor dan impor dari negara-negara berkembang merupakan peristiwa yang menunjukkan perkembangan ekonomi, bahkan beberapa negara-negara kurang berkembang saat ini bergantung terhadap kegiatan ekspornya.²³ Meskipun globalisasi dapat mencakup segala aspek, namun salah satu fenomena yang sangat signifikan saat ini adalah globalisasi yang terjadi dalam bidang ekonomi. Jagdish bhagwati berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mencakup beberapa aspek ekonomi seperti, perdagangan, investasi asing, arus modal dan transfer teknologi. Globalisasi saat ini dapat dijelaskan dengan meningkatnya perdagangan bebas yang terjadi antar negara.²⁴

Salah satu hal mengapa globalisasi sangat erat dikaitkan dengan ekonomi adalah, munculnya gerakan anti-globalisasi berkaitan erat dengan penolakan terhadap peningkatan perdagangan bebas. Menurut M. L. Narasaiah, globalisasi merupakan suatu fenomena yang dapat menunjukkan potensi dunia dengan mendekatkan negara-negara di dunia. Namun, munculnya ketakutan terhadap hal

²²Holm and Sorensen, *Introducing Global Issues 3rd*, ed. Michael T. Snar & D. Neil Snarr, United States of Amerika: Lynne Rienner Publisher, 2005, hal 2.

²³Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy 6th*,

²⁴Jagdish Bhagwati, "Poverty: Enhanced or Diminished?", dalam *In Defense of Globalization*, Oxford: Oxford University Press, 2004, hal 55-67.

tersebut menyebabkan beberapa negara untuk membentuk kebijakan yang mencegah partisipasi negara dalam proses globalisasi tersebut seperti dengan menerapkan proteksionisme perdagangan yang menghambat proses perdagangan bebas.²⁵ M. L. Narsiah dan Bhagwati berpendapat bahwa globalisasi merupakan suatu fenomena yang bisa dimanfaatkan oleh setiap negara dengan partisipasi penuh dalam prosesnya. Bhagwati berpendapat bahwa, globalisasi merupakan suatu fenomena yang sangat menguntungkan dalam mendorong perkembangan suatu negara jika negara tersebut berpartisipasi penuh. Menurut Bhagwati, perdagangan bebas yang terjadi melalui globalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan negara, yang kemudian akan menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan yang terjadi dengan meningkatnya perdagangan merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan pendapatan, mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan juga meningkatkan standar hidup masyarakat miskin.²⁶ Permasalahan yang harus dihadapi oleh suatu negara untuk dapat berpartisipasi penuh dalam globalisasi adalah untuk melakukan perubahan dan reformasi dalam negara untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sudah menjadi standar dari negara-negara lain.²⁷

Konsep globalisasi dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung dan dialami oleh Tiongkok. Keinginan Tiongkok untuk bergabung kembali dalam GATT sejak tahun 1986 dijalankan

²⁵M.L. Narasaiah, "The challenges of Globalisation", dalam *Globalisastion and International Trade*, New Delhi: Discovery Publishing House, 2007, hal 1

²⁶Jagdish Bhagwati, "Poverty: Enhanced or Diminished?", dalam *In Defense of Globalization*, Oxford: Oxford University Press, 2004, hal 55-67.

²⁷M.L. Narasaiah, "The challenges of Globalisation", dalam *Globalisastion and International Trade*, New Delhi: Discovery Publishing House, 2007, hal 2.

oleh Tiongkok selama 15 tahun untuk melakukan perubahan dan reformasi dalam negeri untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ditentukan oleh GATT atau WTO agar Tiongkok dapat menjadi anggota. Keinginan Tiongkok untuk bergabung dalam WTO yang berprinsipkan perdagangan bebas secara tidak langsung menuntut Tiongkok untuk melakukan perubahan besar-besaran agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang diperlukan.

I.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah bahwa globalisasi mempengaruhi sikap Tiongkok terhadap ASEAN sehingga menjadi lebih kooperatif dengan mengambil inisiatif untuk membangun kerjasama dengan ASEAN pada tahun 1991. Namun, meskipun adanya perubahan sikap dari Tiongkok terhadap ASEAN, kepentingan nasional Tiongkok terhadap kawasan Laut Cina Selatan yang berhubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak mengalami perubahan.

I.5 Metodologi Penelitian

I.5.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.5.1.1 Kooperatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kooperatif diartikan sebagai suatu hal yang bersifat kerja sama atau bersedia bekerja sama.²⁸ Sedangkan dalam kamus

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kooperatif*, <http://kbbi.web.id/kooperatif>, (diakses pada 4 Oktober 2014)

Oxford, kooperatif didefinisikan sebagai suatu bentuk keterlibatan dalam hubungan saling membantu dalam bekerja menuju tujuan yang sama.²⁹

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kooperatif adalah terbentuknya hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan ASEAN dalam berbagai bidang. Kemudian, terjadinya perjanjian yang mengikat seperti pembentukan FTA juga merupakan salah satu bentuk sikap kooperatif Tiongkok dengan ASEAN dalam mencapai tujuan yang sama dengan memberikan kewajiban kepada masing-masing negara yang terlibat.

1.5.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Sehingga kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi suatu negara karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan nasional mencakup seluruh hal yang berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara yang menentukan kelangsungan hidup negara tersebut seperti kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.³⁰

Dalam hubungan internasional, kepentingan Nasional dapat dilihat dalam dua segi. Pertama adalah suatu alat analisis untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan obyektif dari suatu negara. Sedangkan yang kedua, kepentingan nasional

²⁹Oxford Dictionaries, Cooperative, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cooperative>, (diakses pada 4 Oktober 2014)

³⁰Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, England: Clio Press Ltd, hal 7.

dapat digunakan untuk menjelaskan preferensi kebijakan dari suatu negara. Kepentingan nasional merupakan istilah yang menjelaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu negara yang berkaitan dengan kedaulatan dan legitimasi dari negara tersebut.³¹ Clinton menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan kebaikan bersama masyarakat suatu negara. Sehingga dalam hubungan internasional, suatu negara memiliki tujuan yaitu untuk mengedepankan kebaikan bersama yang merupakan kepentingan nasional dari negara tersebut dengan mempertahankan atau menambah kekuasaannya.³² Sehingga, dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki berbagai macam kepentingan nasional dan berbagai kebijakan luar negeri untuk mencapainya. Dalam perkembangan hubungan antara Tiongkok dengan ASEAN, okupasi Tiongkok di beberapa wilayah LCS dan keinginan Tiongkok untuk membangun kerjasama dengan ASEAN merupakan kepentingan nasional dari Tiongkok.

1.5.2 Tipe Penelitian

Uber Silalahi menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis penelitian yang dikelompokkan melalui tujuan dari penelitian tersebut. Pertama adalah penelitian eksploratori dimana penelitian ini bertujuan untuk mengenal dan mengetahui gambaran gejala sosial. Kedua, penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengenal dan mengetahui gambaran gejala sosial. Ketiga adalah penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih

³¹Gramham Evans dan Jeffrey Newham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London: Penguin Group, 1998, hal 344.

³²W. David Clinton, *The National Interest: Normative Foundations*, The review of Politics Vol.48, No.4, USA: University of Notre Dame, 1986, hal 497.

gejala. Keempat adalah penelitian komparatif yang bertujuan untuk membandingkan dua gejala atau lebih.³³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan sikap Tiongkok terhadap ASEAN. Hubungan antara variabel yang dijelaskan adalah kepentingan nasional Tiongkok dan pengaruh dari globalisasi yang menyebabkan peningkatan hubungan kerjasama ekonomi antar negara yang menyebabkan perubahan sikap Tiongkok.

1.5.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah dinamika hubungan Tiongkok dengan ASEAN. Konflik sengketa Laut Cina Selatan yang terjadi antara Tiongkok dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina menyebabkan ketegangan antara Tiongkok dengan ASEAN. Namun pada tahun 1991 Tiongkok mengambil inisiatif untuk membangun hubungan dengan ASEAN padahal pada tahun 1988 terjadi bentrokan militer antara Tiongkok dengan Filipina. Untuk ruang lingkup waktu, data dibatasi mulai dari data mengenai perkembangan hubungan Tiongkok dengan ASEAN dan dibatasi pada tahun 2002 dengan terbentuknya *Free Trade Area* dan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* yang dianggap merupakan titik penting meningkatnya hubungan antara Tiongkok dengan ASEAN.

³³Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Unpar Press, 2006, hal 28.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data-data penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi literature sebagai sumber data primer. Studi literature dilakukan dengan penelusuran pustaka seperti penelitian ilmiah, artikel koran dan jurnal *on-line* untuk membantu memperkuat pemahaman peneliti dalam memahami topik permasalahan yang diangkat penulis.³⁴

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tata cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif teknik menekankan pada interpretasi data serta pernyataan yang diperoleh dari pengumpulan data secara sekunder maupun primer yang kemudian akan dikaitkan dengan teori, konsep dan preposisi. Dengan demikian data yang terkumpul akan terklasifikasikan dan memperluas teks. Analisis kualitatif ini terdiri atas tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁵ Reduksikan data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar. Reduksi data dapat dilakukan melalui pembuatan ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat klasifikasi, membuat partisi dan menulis memo. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif maupun teks matriks, grafik, jaringan dan papan. Terakhir, makna-makna

³⁴ Laura Roselle & Sharon Spray, *Scholarly Literature and The Literature Review*, Research and Writing in International Relations, Now York: Pearson Longman.

³⁵ Matthew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, ed Tjejep Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

yang muncul dari data-data yang digunakan diuji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.³⁶

1.5.6 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab II adalah uraian mengenai dinamika Hubungan Tiongkok dengan ASEAN. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN serta perubahan sikap yang dialami Tiongkok dengan melakukan inisiatif untuk membangun kerjasama dengan ASEAN disaat hubungan Tiongkok dengan beberapa negara anggota ASEAN sedang mengalami ketegangan. Selanjutnya Bab III akan memuat mengenai kepentingan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kepentingan Tiongkok yang berkaitan dengan kawasan Asia Tenggara serta kaitannya dengan negara-negara anggota ASEAN.

Kemudian Bab IV akan memuat analisis mengenai sikap yang diambil oleh Tiongkok untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN. Dalam bab ini akan menganalisis mengenai inisiatif yang dilakukan Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN berdasarkan dari data-data di bab II dan bab III. Dan Bab terakhir yaitu Bab V akan memuat kesimpulan yang mengkonfirmasi hipotesis dengan temuan-temuan penelitian serta rekomendasi agenda riset lebih lanjut.

³⁶Matthew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, ed Tjejep Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.